



**P U T U S A N**

**NO. 42/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. IRWANSYAH  
Tempat lahir : Tanjung Morawa.  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /13 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Tanjung Gading Blok P-12/11  
Kab. Batubara/jl. Mantri No.11-A Medan  
Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : PNS  
Pendidikan : S - 1

Terdakwa ditahan / dialihkan penahanannya berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 19 Agustus 2012 Nomor : PRINT-07/N.2/Fd.1/08/2011, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 26 Agustus 2011, Nomor : PRINT-386/N.2/Fd.1/08/2011, sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota tanggal 16 September 2011 Nomor : PRINT-416/N.2/Fd.1/09/2011, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 10 April 2012 No. PRINT – 03/N.2.23.3/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 29 April 2012 ;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 April 2012 No. 312/Pen.Pid/2012/PN.KIS, sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2012 No. 19/PID.SUS.K/2012/PN-Mdn, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya yaitu : 1. HASRUL BENNY HARAHAH, SH MHum, 2. JULISMAN, SH, 3. SYAFRINAL, SH, 4. JULIANDI P. SILALAH SH, 5. RINALDI, SH 6. BUKIT SITOMPUL, SH pada Kantor Law Office : HASRUL BENNY HARAHAH, SH & REKAN ", beralamat di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 1011 / Penk / 2012 / PN. Mdn tanggal 04 Juni 2012.

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum No : Reg.Perk : PDS-03/Kisar/ Ft.1/04/2012 tanggal 10 April 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :**

#### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **IR. IRWANSYAH** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 821.23/105/SPP/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai



dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam TA 2009 memperoleh Anggaran Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batu Bara dengan alokasi anggaran berjumlah Rp 6.709.999.900 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN TA-2009.
- Bahwa dalam pelaksanaan penanganan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara TA 2009, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan



Pertambangan Kabupaten Batu  
Bara TA 2009.

- b. Surat Keputusan Bupati Batu Bara  
Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal -  
Mei 2009 tentang Penghunjujkan  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dilingkungan Dinas Pekerjaan  
Umum dan Pertambangan  
Kabupaten Batu Bara TA 2009.  
Yang ditunjuik adalah :

- Hari Sukardi, ST.
- Syahril Lapau, ST.
- Bahwa selanjutnya panitia  
pengadaan melakukan proses  
pelelangan dari bulan Juni sampai  
dengan bulan Agustus 2009,  
ditentukan sebagai pemenang  
adalah:
  - 1) Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung  
dengan nilai Rp. 940.698.000.
  - 2) Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima  
dengan nilai Rp. 847.330.000.
  - 3) Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemanang  
PT. Pagar Gunung dengan nilai Rp. 1.170.607.000.
  - 4) Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya  
dengan nilai Rp. 705.815.000.
  - 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa  
Karya Rp. 940.599.000.
  - 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT.  
Zhafira Tetap Jaya Rp. 777.040.000.
  - 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan  
nilai Rp. 963.083.000.



- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan oleh PPK Hari Sukardi, ST yang terdiri dari :

- 1) SPK No.20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl.7-8-2009 Kantor Dinas PU dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, ST, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran.
- 2) SPK No.22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl.7-8-2009 kontrak Kantor BKD ditandatangani oleh UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra Jaya, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran.
- 3) SPK No.25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl.7-8-2009 kontrak Kantor BPMD ditandatangani oleh UD. Finika atas nama Hj. Anizar, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan terdakwa selaku Kepala PU dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan serta selaku  
Pengguna Anggaran.

- 4) SPK No.24-LP/PUP-BB/2009  
tgl.7-8-2009 kontrak Dinas  
Perikanan dan Kelautan ditanda  
tangani oleh PT. Zhafira Tetap  
Jaya atas nama M. Irwan, PPK  
oleh Hari Sukardi, ST dan  
terdakwa selaku Kepala PU dan  
Pertambangan serta selaku  
Pengguna Anggaran.

Sedangkan 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya oleh Syahril Lapau, ST terdiri  
dari :

- 1) SPK No.23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak  
Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan yang ditandatangani  
antara UD. Razasa Karya, PPK oleh Syahril Lafau, ST dan  
terdakwa selaku Kepala PU dan Pertambangan serta juga  
selaku Pengguna Anggaran.
- 2) SPK No.18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 Kantor  
BPPKAD ditanda tangani oleh UD. Razasa Agung atas nama  
Safreni, PPK oleh Syahril Lapau, ST dan terdakwa selaku  
Kepala PU dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna  
Anggaran.
- 3) SPK No.19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak  
Kantor BAPPEDA ditanda tangani oleh CV. Tegar Prima atas  
nama Donny Lisa Putra, PPK oleh Syahril Lapau, ST dan  
terdakwa selaku Kepala PU dan Pertambangan serta juga  
selaku Pengguna Anggaran.

akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-  
masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-  
masing kontrak dimaksud.



- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 s/d Desember 2009.
- Bahwa setelah penanda tanganani Surat Perjanjian Pekerjaan kemudian Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lapau, ST membuat Surat Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD TA. 2009 ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan. Adapun Isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertambangan Kab. Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak.

- 2) Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan.
- 3) Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara.
  - Bahwa benar kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan pada tanggal 01 September 2009 mengadakan rapat dan dari rapat tersebut dibuat Risalah Rapat Koordinasi/ Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut  
*"Pembangunan gedung kantor, disain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara*





*sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang”.*

Bahwa hasil berupa risalah rapat tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan disepakati juga oleh oleh PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lapau, ST, serta PPTK yaitu M. Yunus, ST, dan Koordinator Pengawas yaitu Sanusi, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/nota kesepakatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK melalui surat nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 meminta kepada rekanan untuk melakukan *survey* terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara.
- Pada Tanggal 13 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 yang isinya Penyerahan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan : *"Bangunan yang bercirikan Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tumohon Sulawesi Utara"*.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali menyurati rekanan dengan Surat Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

- Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M<sup>2</sup>;
- Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu kelas 1);
- Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
- Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
- Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala



resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan.

- Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2009 juga, HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat : 079/PPK/PUP-BB/2009 yang isi surat tersebut mengenai Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kabupaten Batubara.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2009 CV. Gratia membalas dari PPK Nomor Surat : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 yaitu dengan surat Nomor : "Khusus" yang isinya penyampaian harga penawaran harga rumah kayu Tumohon, dalam surat tersebut disebutkan bahwa harga rumah siap jadi tumohon type 120 sebesar Rp 2.900.000 / m<sup>2</sup> dengan ketentuan :
  - Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan ciri khas daerah;
  - Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko diperjalanan;
  - Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);



- Belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jamiman keselamatan);
- Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi.
- Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton.
- Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk mauppun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali.
- Bahwa faktanya surat dari CV Gratia nomor : "Khusus" tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky bukan dari pihak CV. Gratia. Surat tersebut dibuat seolah-olah CV Gratialah yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan CV Gratia yaitu saksi Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD selaku Direktur CV. Gratia, padahal surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD.
- Bahwa secara *faktual* isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, Adapun yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar/tidak sesuai dengan  
kenyataan adalah :

- a. Me  
set  
per  
Hei  
set
- b. Ter  
tida  
me  
buli  
Bat
- c. Ter  
tida  
per
- d. Ter  
jugi  
bor
- e. Ter  
dar  
jugi  
bia  
ma

- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan bercirikhas Melayu Batubara sebagai berikut :
- Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor : 012/TP/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikhas melayu, dimana mereka menyampaikan harga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.925.000 / m2.

- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor : 035/RA/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.075.000 / m2.
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor : 021/RK/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.950.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor : 017/PG/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.150.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor : 027/FN/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.050.000 / m2.
- Tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor : 037/ZPJ/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.900.000 / m2.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikan Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp 3.700.000 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi.
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Final Quantity pekerjaan tanpa tanggal dengan





perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M<sup>2</sup>, BKD luas 375 M<sup>2</sup>, BAPPEDA luas 300 M<sup>2</sup>, DPPKAD luas 333 M<sup>2</sup>, Perikanan dan Kelautan luas 270 M<sup>2</sup>, BPMD luas 333 M<sup>2</sup>, Pertanian dan Peternakan luas 500 M<sup>2</sup> masing-masing diperkecil menjadi luas 120 M<sup>2</sup>, tetapi nilai/harga kontrak tidak ada perubahan.

- Bahwa atas izin dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan telah mengizinkan Hari Sukardi, ST dan juga Syahrial Lafau, ST dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan/penyedia barang/jasa, dengan cara menyurati CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk 7



kantor SKPD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang adalah fiktif. Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan izin kepada Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST untuk bertindak melampaui batas kewenangannya selaku PPK yaitu telah bertindak seolah-olah sebagai rekanan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta dan data, juga telah ditemukan indikasi bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa selaku Pengguna Barang / Jasa dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan juga PPTK yaitu M. Yunus, ST yaitu bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/



penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan *me mark up* harga, melakukan penawaran secara langsung oleh PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Prop. Sulawesi Utara, padahal kenyataannya pihak CV. Gratia tidak pernah menerima atau mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung.

- Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batu Bara tersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, kantor Dinas pertanian, kantor BPMD, kantor BAPPEDA, dan kantor DPPKAD oleh terdakwa bersama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK telah mengajukan pencairan dana kepada bagian keuangan dan oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Batubara telah dicairkan dananya yaitu sebagai berikut :

**1) Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab.Batu Bara Rp.705.815.000.-**



- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2030.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : : 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 ( Ringkasan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab.Batu Bara sebesar Rp.705.815.000.- yang diterima oleh Sdr.Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dana diketahui oleh Kepada Dinas PU dan Pertambangan.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D0 Nomor : 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009.

**2) Pembangunan kantor BPMD Kab.Batu Bara  
Kec.Lima Puluh Rp.963.083.000,-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2028.



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : : 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor BPMD Kab.Batu Bara Kec.Lima Puluh sebesar Rp.963.083.000.- yang
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4548/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

**3) Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Batu Bara Rp.777.040.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2027.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0334/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Batu Bara sebesar Rp.777.040.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4549/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

**4) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara Rp.847.330,000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2025.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)



- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara sebesar Rp. 847.330,000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**5) Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara Rp.940.698.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2026.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.





- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara sebesar Rp. .940.698.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**6) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan  
Peternakan Kab.Batu Bara sebesar  
Rp.837.988.200.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2024.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)



- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Pertaanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**7) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp.1.179.607.000.-**

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4613/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009.

- Bahwa selanjutnya bendahara Umum daerah Kab. Batubara memindahkan /mentransfer dana pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut masing-masing ke :

- 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 610.01.04.000358.0 sebesar Rp 1.050.922.600 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.
- 2) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 61001040003970 sebesar Rp 754.894.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 3) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 610.01.04.000380.0 sebesar Rp 692.272.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 4) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam



Nomor : 631.01.04.000025-6 Rp 838.076.400  
dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.

5) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank  
Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam  
Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 628.817.000  
dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.

6) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank  
Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam  
Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 837.988.200  
dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.

7) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut  
Cabang Syariah Medan Nomor : 610.01.04.000379-0  
Rp 858.019.400 dipindah bukukan pada tanggal 31  
Desember 2009.

Jumlah dana yang dipindah bukukan tersebut di atas adalah jumlah  
bersih setelah dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 3 % dan  
pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor.

- Bahwa nomor rekening  
sebagaimana tersebut di atas  
bukanlah milik masing-masing  
rekanan, akan tetapi milik M.  
ANDY S dan HENDRY S atas  
nama masing-masing perusahaan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan  
oleh terdakwa selaku Kepala  
Dinas Pekerjaan Umum dan  
Pertambangan Kab. Batu Bara  
dan juga selaku Pengguna  
Anggaran bersama-sama dengan  
Hari Sukardi, ST, Syahril Lapau,  
ST selaku PPK (Pejabat Pembuat  
Komitmen), adalah perbuatan



melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian/rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif.
- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 847.330.000 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama. dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kwalitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran.
- 3) Pasal 32 (4) “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain



dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis". Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M.Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara baik selaku Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK.

- 4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

- Bahwa berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain oleh Pihak PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahril Lafau, ST bersama dengan terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dan juga M.Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga terjadi kesepakatan sepihak dikalangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahril Lafau, ST selaku PPK dan M.Yunus selaku PPTK. Disamping itu kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang/jasa adalah fiktif, dan dibuat hanya sebatas formalitas saja.
- Bahwa disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu pada CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung



kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 847.330.000 telah dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan),

- Bahwa perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu :

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor.

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil/toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga





tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran).

3) Standarisasi keamanan; Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST, dan SYAHRIAL LAFAU, ST, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, dengan perincian :

- |  |    |
|--|----|
| 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar               | Rp |
| 176.231.696,78                                     |    |
| 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar              | Rp |
| 108.912.840,89                                     |    |
| 3) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan    | Rp |
| 158.828.321,00                                     |    |
| 4) Pembangunan Kantor BKD                          | Rp |
| 162.401.699,22                                     |    |
| 5) Pembangunan Kantor Pertanian                    | Rp |
| 115.465.916,00                                     |    |
| 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan |    |
| Rp 195.811.409,77                                  |    |
| 7) Pembangunan Kantor BPMD                         | Rp |
| 31.434.050,32                                      |    |

sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab.





Batubara TA. 2009 dari Kepala BPKP Prop. Sumatera Utara Nomor :  
SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **IR. IRWANSYAH** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 821.23/105/SPP/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bbara (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam TA 2009 memperoleh Anggaran Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batu Bara dengan alokasi anggaran berjumlah Rp 6.709.999.900 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK APBN TA-2009.

- Bahwa dalam pelaksanaan penanganan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batu Bara TA 2009, Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009.
- b. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penghunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara TA 2009. Yang ditunjuk adalah :

- Hari Sukardi, ST.
- Syahril Lapau, ST.

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, ditentukan sebagai pemenang adalah:



- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai Rp. 940.698.000.
- 2) Pembangunan Kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai Rp. 847.330.000.
- 3) Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai Rp. 1.170.607.000.
- 4) Pembangunan Kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai Rp. 705.815.000.
- 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya Rp. 940.599.000.
- 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya Rp. 777.040.000.
- 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai Rp. 963.083.000.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak/Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan oleh PPK Hari Sukardi, ST yang terdiri dari :

- 1) SPK No.20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl.7-8-2009 Kantor Dinas PU dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, ST, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran.



- 2) SPK No.22-LP/SPK/PUP-BB/2009  
tgl.7-8-2009 kontrak Kantor BKD  
ditanda tangani oleh UD. Razasa  
Karya atas nama Zaidan Indra  
Jaya, PPK oleh Hari Sukardi, ST  
dan terdakwa selaku Kepala  
Dinas PU dan Pertambangan  
serta selaku Pengguna Anggaran.
- 3) SPK No.25-LP/SPK/PUP-BB/2009  
tgl.7-8-2009 kontrak Kantor BPMD  
ditanda tangani oleh UD. Finika  
atas nama Hj. Anizar, PPK oleh  
Hari Sukardi, ST dan terdakwa  
selaku Kepala PU dan  
Pertambangan serta selaku  
Pengguna Anggaran.
- 4) SPK No.24-LP/PUP-BB/2009  
tgl.7-8-2009 kontrak Dinas  
Perikanan dan Kelautan ditanda  
tangani oleh PT. Zhafira Tetap  
Jaya atas nama M. Irwan, PPK  
oleh Hari Sukardi, ST dan  
terdakwa selaku Kepala PU dan  
Pertambangan serta selaku  
Pengguna Anggaran.

Sedangkan 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya oleh Syahrial Lafau, ST terdiri dari:

- 1) SPK No.23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor Dinas  
Pertanian dan Peternakan yang ditandatangani antara UD. Razasa  
Karya, PPK oleh Syahrial Lafau, ST dan terdakwa selaku Kepala PU  
dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran.



2) SPK No.18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 Kantor BPPKAD ditanda tangani oleh UD. Razasa Agung atas nama Safreni, PPK oleh Syahrial Lapau, ST dan terdakwa selaku Kepala PU dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran.

3) SPK No.19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tgl. 21-8-2009 kontrak Kantor BAPPEDA ditanda tangani oleh CV. Tegar Prima atas nama Donny Lisa Putra, PPK oleh Syahrial Lapau, ST dan terdakwa selaku Kepala PU dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran.

akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 s/d Desember 2009.
- Bahwa setelah penanda tanganani Surat Perjanjian Pekerjaan kemudian Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lapau, ST membuat Surat Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya Rapat Dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada Pelaksanaan Mayor Item Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Proyek APBD TA. 2009



ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan. Adapun Isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, Pihak Konsultan Pengawasan dan Pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak.
- 2) Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan Rapat Dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan.
- 3) Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara.
  - Bahwa benar kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan pada tanggal 01 September 2009 mengadakan



rapat dan dari rapat tersebut dibuat Risalah Rapat Koordinasi/Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut *"Pembangunan gedung kantor, disain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat batu bara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batu Bara yang merupakan Kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas melayu dengan konstruksi kayu siap pasang"*. Bahwa hasil berupa risalah rapat tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan disepakati juga oleh oleh PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lapau, ST, serta PPTK yaitu M. Yunus, ST, dan Koordinator Pengawas yaitu Sanusi, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat/nota kesepakatan tersebut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK melalui surat nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 meminta kepada rekanan untuk melakukan *survey* terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara.
- Pada Tanggal 13 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali mengirim surat kepada para rekanan dengan surat Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 yang isinya Penyerahan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan : *"Bangunan yang bercirikan Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tumohon Sulawesi Utara"*.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali menyurati rekanan dengan Surat Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan tersebut mempunyai luas 120 M<sup>2</sup>;
- Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu klas 1);
- Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan;
- Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang saudara sampaikan;
- Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan.
- Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2009 juga, HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat : 079/PPK/PUP-BB/2009 yang isi surat tersebut mengenai Permohonan rujukan harga bangunan bercirikan melayu Kabupaten Batubara.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2009 CV. Gratia membalas dari PPK Nomor Surat : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 yaitu dengan surat Nomor : "Khusus" yang isinya penyampaian harga penawaran harga rumah kayu Tumohon, dalam surat tersebut



disebutkan bahwa harga rumah  
siap jadi tumohon type 120  
sebesar Rp 2.900.000 / m<sup>2</sup>

dengan ketentuan :

- Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan cirikhas daerah;
- Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko diperjalanan;
- Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada);
- Belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jamiman keselamatan);
- Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi.
- Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton.
- Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk mauppun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali.
- Bahwa faktanya surat dari CV Gratia nomor : "*Khusus*" tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky bukan dari pihak CV. Gratia. Surat tersebut dibuat seolah-olah CV Gratialah yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan CV Gratia yaitu



saksi Drs. LEANDER IBRAHIM  
WULLUR SUMAKUD selaku  
Direktur CV. Gratia, padahal surat  
tersebut tidak pernah  
ditandatangani oleh Drs.  
LEANDER IBRAHIM WULLUR  
SUMAKUD.

- Bahwa secara *faktual* isi surat  
tersebut sebahagian besar adalah  
tidak benar, Adapun yang tidak  
benar/tidak sesuai dengan  
kenyataan adalah :

- a. Mengenai  
harga,  
bahwa  
harga  
sebenarnya  
yang  
terrealisasi  
bukanlah  
sebesar Rp  
2.900.000  
sebagaimana  
a tertuang  
dalam surat  
tersebut dan  
surat  
perjanjian  
antara Drs.  
LEANDER  
IBRAHIM  
WULLUR



SUMAKUD  
dengan Sdr.  
Hengki  
(dokumen  
sudah  
hilang),  
harga  
sebenarnya  
yang  
terrealisasi  
adalah  
sebesar Rp  
2.100.000  
(dua juta  
seratus ribu  
rupiah).

b. Tentang  
tanggal  
yang  
tercantum  
disurat (17  
September  
2009)  
tersebut  
juga tidak  
benar,  
karena  
sewaktu  
Drs.  
LEANDER  
IBRAHIM  
WULLUR  
SUMAKUD



menandatangani

surat

tersebut

sebenarnya

pekerjaan

sudah jalan

yakni di

bulan akhir

Oktober

2009 dan

bahan

rumah

panggung

tersebut

sudah

sampai di

Batubara.

c. Tentang

belum

termasuk

biaya

pengiriman

dan resiko

diperjalanan

, hal ini tidak

benar,

karena

harga Rp

2.100.000

per m<sup>2</sup>

sudah

termasuk



- biaya  
pengiriman.
- d. Tentang  
belum  
termasuk  
biaya  
bongkar  
maupun  
langsir (bila  
ada), hal ini  
juga tidak  
benar  
karena  
harga Rp  
2.100.000  
per m<sup>2</sup>  
sudah  
termasuk  
biaya  
bongkar  
langsir.
- e. Tentang  
belum  
termasuk  
biaya  
personil /  
tukang  
(transportasi  
,  
akomodasi,  
dan biaya  
makan)





selama  
masa  
pengerjaan,  
dan jaminan  
keselamatan,  
hal ini  
juga tidak  
benar,  
karena  
harga Rp  
2.100.000  
per m<sup>2</sup>  
sudah  
termasuk  
biaya biaya  
personil /  
tukang  
(transportasi  
,  
akomodasi,  
dan biaya  
makan)  
selama  
masa  
pengerjaan,  
dan jaminan  
keselamatan  
n.

- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara sebagai berikut :



- Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor : 012/TP/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.925.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor : 035/RA/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.075.000 / m2.
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor : 021/RK/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.950.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor : 017/PG/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.150.000 / m2.
- Tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor : 027/FN/IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 4.050.000 / m2.
- Tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor : 037/ZPJ/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX/2009 perihal usulan bangunan bercirikan melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan bercirikan melayu Batubara seluas 120 M2 dengan harga Rp 3.900.000 / m2.

- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan bercirikan Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan bercirikan khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikan Melayu Batubara yang disepakati type 120 M2 adalah sebesar Rp 3.700.000 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi.



- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Final Quantity pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas PU dan Pertambangan luas 417 M2, BKD luas 375 M2, BAPPEDA luas 300 M2, DPPKAD luas 333 M2, Perikanan dan Kelautan luas 270 M2, BPMD luas 333 M2, Pertanian dan Peternakan luas 500 M2 masing- masing diperkecil menjadi luas 120 M2, tetapi nilai/ harga kontrak tidak ada perubahan.
- Bahwa atas izin dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Pertambangan telah mengizinkan Hari Sukardi, ST dan juga Syahrial Lafau, ST dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan/penyedia barang/jasa,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyurati CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai/harga bangunan panggung kayu untuk 7 kantor SKPD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggungjawab rekanan dalam SPK/Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama Rekanan/Perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan Perusahaan Rekanan masing-masing dalam SPK yang adalah fiktif. Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan izin kepada Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST untuk bertindak melampaui batas kewenangannya selaku PPK yaitu telah bertindak seolah-olah sebagai rekanan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta dan data, juga telah ditemukan indikasi bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa selaku Pengguna Barang / Jasa dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan juga PPTK yaitu M. Yunus, ST yaitu bersama-sama sepakat untuk



melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan/penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan *me mark up* harga, melakukan penawaran secara langsung oleh PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Prop. Sulawesi Utara, padahal kenyataannya pihak CV. Gratia tidak pernah menerima atau mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung.

- Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batu Bara tersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas PU dan Pertambangan, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, kantor Dinas pertanian, kantor BPMD, kantor BAPPEDA, dan kantor DPPKAD oleh terdakwa bersama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK telah mengajukan pencairan dana kepada bagian keuangan dan oleh Bendahara Umum Daerah Kab.



Batubara telah dicairkan dananya  
yaitu sebagai berikut :

**1) Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian  
Daerah Kab.Batu Bara Rp.705.815.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2030.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : : 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab.Batu Bara sebesar Rp.705.815.000.- yang diterima oleh Sdr.Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dana diketahui oleh Kepada Dinas PU dan Pertambangan.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D0 Nomor : 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009.





**2) Pembangunan kantor BPMD Kab.Batu Bara  
Kec.Lima Puluh Rp.963.083.000,-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2028.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : : 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor BPMD Kab.Batu Bara Kec.Lima Puluh sebesar Rp.963.083.000.- yang
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4548/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

**3) Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Batu Bara Rp.777.040.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2027.



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0334/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Batu Bara sebesar Rp.777.040.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4549/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

**4) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara Rp.847.330,000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2025.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.



- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Bappeda Kab.Batu Bara sebesar Rp. 847.330,000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009.

**5) Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara Rp.940.698.000.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2026.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor: 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang



ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.

- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kab.Batu Bara sebesar Rp. .940.698.000.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**6) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan  
Pternakan Kab.Batu Bara sebesar  
Rp.837.988.200.-**

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kab.Batu Bara Nomor : 900/2024.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor : SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK)
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor : 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.



- Surat permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ( Ringkasaan kegiatan)
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran Pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Batu Bara sebesar Rp.837.988.200.-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009

**7) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp.1.179.607.000.-**

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4613/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa selanjutnya bendahara Umum daerah Kab. Batubara memindahkan /mentransfer dana pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut masing-masing ke :
  - 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 610.01.04.000358.0 sebesar Rp 1.050.922.600 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.
  - 2) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 61001040003970 sebesar Rp 754.894.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
  - 3) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor : 610.01.04.000380.0 sebesar Rp 692.272.000 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.



- 4) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000025-6 Rp 838.076.400 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.
- 5) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 628.817.000 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.
- 6) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor : 631.01.04.000024-4 Rp 837.988.200 dipindah bukukan pada tanggal 06 Januari 2010.
- 7) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut Cabang Syariah Medan Nomor : 610.01.04.000379-0 Rp 858.019.400 dipindah bukukan pada tanggal 31 Desember 2009.

Jumlah dana yang dipindah bukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 3 % dan pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan sudah di setor.

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi milik M. ANDY S dan HENDRY S atas nama masing-masing perusahaan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara dan juga selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST, Syahrial Lapau,





ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu :

- 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian/rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif.
- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas/volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 847.330.000 dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M, namun jumlah biaya kontrak sama. dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kewalitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran.





- 3) Pasal 32 (4) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis". Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga/orang lain bernama M.Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang/jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara baik selaku Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK.
- 4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
- Bahwa berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain oleh Pihak PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST bersama dengan terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dan juga M.Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang dirubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga terjadi kesepakatan sepihak dikalangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan M.Yunus selaku PPTK. Disamping itu kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang/jasa adalah fiktif, dan dibuat hanya sebatas formalitas saja.



- Bahwa Disisi lain bangunan yang dirubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu pada CV. Gratia Minahasa, Perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metoda kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara luas 417 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 1.179.607.000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 705.815.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas 270M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 777.040.000, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batu Bara luas 500 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 940.599.000, Dinas DPPKAD Kab. Batu Bara luas 333 M<sup>2</sup> Rp 940.6989.000, Dinas BAPPEDA Kab. Batu Bara luas 300 M<sup>2</sup> nilai kontrak Rp 847.330.000 telah dirubah masing-masing luasnya sama seluas 120M dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan),

- Bahwa perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu :

1) Standarisasi keselamatan;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor.

2) Standarisasi efektif, efisien;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil/



toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisien waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran).

- 3) Standarisasi keamanan; Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel/dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen/arsip tidak terjamin keamanannya.

1) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST, dan SYAHRIAL LAFAU, ST, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar **949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah)**, dengan perincian :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp 176.231.696,78
- 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar Rp 108.912.840,89
- 3) Pembangunan Kantor dinas PU dan Pertambangan Rp 158.828.321,00
- 4) Pembangunan Kantor BKD Rp 162.401.699,22
- 5) Pembangunan Kantor Pertanian Rp 115.465.916,00
- 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 195.811.409,77
- 7) Pembangunan Kantor BPMD Rp 31.434.050,32



sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara TA. 2009 dari Kepala BPKP Prop. Sumatera Utara Nomor : SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

**II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum**  
**Nomor.REG.PERK.PDS-03/Kisar/Ft.1/04/2012 tanggal 10 April 2012**  
**yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **Ir. Irwansyah** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yaitu dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ir. Irwansyah** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp. 474.542.966,98 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen)** kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Batubara setelah putusan pengadilan memperoleh



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun.**

- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
  2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
  3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
  4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.
  5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
  6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor



- Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.
8. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA.
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
  - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
  - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.





- Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA
- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG.
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum





Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23  
September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- 10.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)
- 11.2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 12.1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- 13.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 14.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 15.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 16.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).



- 17.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 18.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 19.1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
- 20.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 21.7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- 22.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
- 23.2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
- 24.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 28.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 30.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 31.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 32.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 33.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 34.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 35.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 36.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 37.1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I



Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.

38.1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.

39.1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.

40.1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.

41.1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA

42.1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA

43.1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.

44.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.



- 45.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
- 46.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 47.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.
- 48.1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
- 49.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 50.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 51.1 (satu ) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.
- 52.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor





- KONtrak 18 – LP /SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
- 53.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP / SPK/ PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.
- 56.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
- 57.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
60. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen



dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.

61. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
62. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
63. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.
64. Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.
65. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22.
66. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18.
67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19.
68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20.
69. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.





70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25.
71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
72. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23.
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikhas Melayu Kab. Batubara.
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tomohon.
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.



79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan



sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.

90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.

91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa

92. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.

93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.

94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.

95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.

96. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.

97. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

**III. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 19/PID.SUS.K/2012/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **Ir. IRWANSYAH** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;



- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Ir. IRWANSYAH** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
  2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
  3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
  4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.
  5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor



- Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHA FIRA TETAP JAYA.
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.
8. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor BPMD Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar  
Rp.24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010  
dari UD. FINIKA.
- b. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk



pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor BPMD Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari UD.  
FINIKA.

- c. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor Perikanan  
dan Kelautan Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010  
dari PT. ZHAFIRA  
TETAP JAYA.

- d. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian





dana  
pembangunan  
Kantor Perikanan  
dan Kelautan Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari PT.  
ZHAFIRA TETAP  
JAYA.

- e. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor Dinas  
Pertanian dan  
Perternakan Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010  
dari UD. RAZASA  
KARYA.

- f. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank





Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor Dinas  
Pertanian dan  
Perternakan Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari UD.  
RAZASA KARYA

- g. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor Badan  
Kepegawaian  
Daerah Kab.  
Batubara ke Kas  
Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010  
dari UD. RAZASA  
KARYA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1 (satu) lembar asli

Bukti Setoran Bank

Sumut untuk

pengembalian

dana

pembangunan

Kantor Badan

Kepegawaian

Daerah Kab.

Batubara ke Kas

Umum Daerah

Kab. Batubara

sebesar Rp.

4.200.000,- tanggal

24 September

2010 dari UD.

RAZASA KARYA.

i. 1 (satu) lembar

asli Bukti Setoran

Bank Sumut untuk

pengembalian

dana

pembangunan

Kantor Dinas PU

dan Pertambangan

Kab. Batubara ke

Kas Umum Daerah

Kab. Batubara

sebesar Rp.

24.000.000,-

tanggal 23

September 2010



dari PT. PAGAR  
GUNUNG.

j. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor Dinas PU  
dan Pertambangan  
Kab. Batubara ke  
Kas Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari PT.  
PAGAR GUNUNG.

k. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor BAPEDA  
Kab. Batubara ke  
Kas Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari CV. TEGAR  
PRIMA.

- l. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor BAPEDA  
Kab. Batubara ke  
Kas Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari CV.  
TEGAR PRIMA.

- m. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor DPPKAD  
Kab. Batubara ke  
Kas Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
4.200.000,- tanggal  
24 September  
2010 dari CV.  
RAZASA AGUNG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. 1 (satu) lembar asli  
Bukti Setoran Bank  
Sumut untuk  
pengembalian  
dana  
pembangunan  
Kantor DPPKAD  
Kab. Batubara ke  
Kas Umum Daerah  
Kab. Batubara  
sebesar Rp.  
24.000.000,-  
tanggal 23  
September 2010  
dari CV. RAZASA  
AGUNG

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- 10.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)
- 11.2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 12.1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).



- 13.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 14.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 15.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 16.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 17.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 18.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 19.1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
- 20.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 21.7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- 22.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
- 23.2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
- 24.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 28.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 30.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor:161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 31.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 32.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 33.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan





- nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 34.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 35.2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 36.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 37.1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
- 38.1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.
- 39.1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 40.1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
- 41.1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA



- 42.1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA
- 43.1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
- 44.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 45.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
- 46.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 47.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.
- 48.1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
- 49.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak



- Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 50.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (500 M2) Nomor Kontrak 23 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 51.1 (satu ) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.
- 52.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18 – LP /SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.
- 53.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP / SPK/ PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.
- 56.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.



- 57.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.
- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
60. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.
61. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
62. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
63. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.
64. Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.



65. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22.
66. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18.
67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19.
68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20.
69. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-25.
71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor paket LP-24.
72. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor paket LP-23.
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikhas Melayu Kab. Batubara.





75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikhas melayu Kab. Batubara.
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon.
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.



85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.
91. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa
92. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.
93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.
94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.
95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.





96. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.

97.7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.

Digunakan pada perkara lain.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding No.48/ Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012 No.48/PID.SUS.K/2012/PN-MDN. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012;

V. Akta Permintaan Banding No.51/ Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012 No.19/PID.SUS.K/2012/PN-MDN. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012;

VI. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2012



dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012;

**VII.** Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Nopember 2012 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012;

**VII.** Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 26 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Nopember 2012 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012;

**VIII.** Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 19/PID.SUS.K/2012/PN-MDN. selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PN-MDN. Tanggal 19 Oktober 2012 Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan



Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Banding No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PN-Mdn. tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa juga telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam Akte Banding No.51 Akta Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tanggal 23 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan No.51 Akta Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut tertanggal 26 Nopember 2012. Demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari perkara a tersebut, salinan resmi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PN-Mdn. tanggal 19 Oktober 2012 beserta pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut perlu diperbaiki ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, sedangkan Hakim tingkat pertama telah menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dan dakwaan subsidair terbukti. Hakim tingkat pertama tidak pernah menguraikan dalam pertimbangannya unsur-unsur yang mana dakwaan tidak terbukti ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti putusan tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang jelas, pada hal fakta dipersidangan sudah jelas bahwa dana untuk kegiatan pembangunan 7 Kantor SKPD pada pemerintah Kabupaten Batubara dengan nilai Rp.6.709.999.900.- (enam milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah ) tidak disalurkan Terdakwa kepada rekanan sebagaimana ditentukan dalam kontrak melainkan dimanipulasi dengan membuat nomor rekening rekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan Konta memori banding, Majelis Hakim Tinggi menganggap hal tersebut merupakan permohonan dan pengulangan pada memori banding ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum point 1, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menguraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaan yang subsidair haruslah dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pembuktian akan dilanjutkan pada dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Uu No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain.

**Ad.1 Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan menurut ketentuan peraturan, norma atau perundang-undangan apabila bertentangan dengan norma atau peraturan perundang-undangan bagi yang melanggarnya akan dikenai nestapa atau sanksi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah



terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri ialah membuat diri sendiri, orang lain atau korporasi menjadi lebih kaya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsure pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka Majelis perlu mempertimbangkan, apakah terdakwa telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang dikualifisir sebagai orang yang melakukan, apabila ia sendiri telah melakukan seluruh unsur / elemen perbuatan pidana hingga selesai tanpa adanya peran serta orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang dikualifisir sebagai orang yang menyuruh melakukan, apabila selesainya suatu detik itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan orang pertama tadi sebagai intelektuale daader saja, tidak ikut melakukan unsur / elemen perbuatan walau sebagian;

Menimbang, bahwa apabila ia bersama-sama dengan orang lain melakukan perbuatan pidana walaupun ia hanya melakukan salah satu unsur / elemen perbuatan tersebut, maka ia dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan , turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Kabupaten Batubara berdasarkan surat keputusan Bupati Batubara No. 821.23/108/SPP/2008 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara;





Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Umum dan Pertambangan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembangunan 7 (tujuh) buah unit proyek pembangunan gedung di lingkungan Kabupaten Batu bara dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.709.999.900,- ( Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yakni:

1. Kantor DPPKAD.
2. Kantor BAPPEDA.
3. Kantor Dians PU dan Pertambangan.
4. Kantor BKD.
5. Kantor Dinas Pertanian.
6. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan.
7. Kantor BPMD.

Menimbang, bahwa setelah proyek pembangunan 7 kantor SKPD Kabupaten Batubara dengan perubahan-perubahan (CCO= Change Contract Order ) diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Nomor: 515 B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu sebesar Rp. 197.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa uang kelebihan pembayaran tersebut yang ditemukan oleh BPK RI, berdasarkan bukti point 8, telah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan pembayaran perhitungan tersebut ke kas Daerah Kabupaten Batubara, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi Medan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka unsur delik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan





primair harus dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur delik dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya meliputi:

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan penambahan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ialah bahwa perbuatan tersebut mendatangkan pendapatan atau nilai tambah dan tidak harus memperoleh atau mendatangkan untung, atau memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan para saksi di persidangan, maka telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, baik para pemenang



tender atau pihak lain yang menggunakan perusahaan pemenang tender telah mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap adanya transfer sejumlah uang kepada para pemenang tender yakni :

1. Kepada PT. PAGAR AGUNG, sebesar Rp. 1.050.922.600,-
2. Kepada PT. ZHAFIRA TETAP JAYA, sebesar Rp. 692.272.000,-
3. Kepada UD. RAZASA KARYA, sebesar Rp. 628.817.000,-
4. Kepada UD. FINIKA, sebesar Rp. 858.019.400,-

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2012, mengenai kerugian negara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah adanya serah terima bangunan 7 kantor SKPD oleh para rekanan dengan PPK Hari Sukardi, ST dan Terdakwa, kemudian ditindak lanjuti dengan pembayaran ke masing-masing rekanan, maka pembangunan proyek 7 kantor SKPD tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahan-perubahannya;
- Bahwa, terhadap pelaksanaan proyek pembangunan 7 kantor SKPD tersebut pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, yang dalam laporannya terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu sebesar Rp. 197.400.000,- dan terhadap kelebihan bayar tersebut telah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengembalian oleh masing-masing rekanan ke rekening kas daerah Pemkab Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang dikutip diatas, maka sesungguhnya Terdakwa telah mengakui adanya kelebihan pembayaran;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian ada pengembalian dari kelebihan pembayaran oleh para rekanan, maka hal itu tidak dapat



menghapus perbuatan pidana terdakwa, karena sesungguhnya delik/  
perbuatan pidana itu sendiri sudah selesai;

**Ad. b. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau saran  
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan  
kewenangan ialah menyalah gunakan serangkaian hak yang melekat pada  
jabatan atau kedudukan dari si pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil  
tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan  
baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna  
Anggaran pada SKPD Kabupaten Batubara berdasarkan surat keputusan Bupati  
Batubara No. 821.23/108/SPP/2008 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama  
dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST, masing-masing sebagai  
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Pertambangan Kabupaten Batubara, Terdakwa sebagai pengguna anggaran  
melaksanakan tugas membangun 7 kantor SKPD di Kabupaten Batubara.

Menimbang, bahwa di dalam SPK awal luas pembangunan kantor Dinas  
PU dan Pertambangan adalah 417 m-2 dengan pagu anggaran Rp.  
1.170.607.000,- kantor BKD seluas 375 m-2 dengan pagu anggaran Rp.  
705.815.000,-, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan seluas 270 m-2 dengan  
pagu anggaran Rp. 777.040.000,- dan kantor BPMD seluas 333 m-2 dengan  
pagu anggaran Rp. 863.083.000,-.

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan kantor-kantor  
tersebut setelah diadakan Change Contract Order (CCO), luas masing-masing  
kantor menjadi 120 m-2, dan yang semula bangunan beton diubah menjadi  
bangunan kayu akan tetapi dengan pagu anggaran yang sama tetap seperti  
yang tercantum di dalam kontrak awal;

Menimbang, bahwa hal ini dapat dilakukan karena adanya CCO yang  
dibuat oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa sebagai saksi dan Syahrial Lafau,  
ST;



Menimbang, bahwa CCO hanya dapat dilakukan terhadap adanya penambahan dan perubahan minor terhadap suatu proyek bangunan, bukan terhadap perubahan total bentuk, konstruksi dan bahan bangunan serta item-item dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan para saksi, pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, Kantor BKD dan Kantor Perikanan dan Kelautan serta Kantor BPMD semula telah ditetapkan bangunan gedung kantor dengan jenis beton, akan tetapi kemudian diubah melalui CCO bentuk bangunan dengan bahan kayu dan luasnya tidak sesuai dengan kontrak awal, melainkan yang kemudian diubah menjadi setiap kantor hanya 120 m<sup>2</sup> akan tetapi nilai kontrak atau pagu anggaran tetap sama seperti semula, tidak berubah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum seperti yang terurai diatas, maka perbuatan terdakwa yang dengan melalui CCO merubah luasan menjadi setiap bangunan menjadi hanya 120 m<sup>2</sup> dan jenis bangunan pembangunan 4 kantor SKPD Kab. Batubara yang semula telah ditetapkan dari beton kemudian diubah menjadi bangunan dari jenis kayu tersebut, telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa pembangunan ke 7 kantor di lingkungan SKPD Kab. Batubara adalah pembangunan gedung kantor adalah bentuk berkelanjutan untuk tahun anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa alasan banding ini harus ditolak, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Batubara Nomor : 114. B/DPU/2009, jelas menyebutkan bahwa pembangunan 7 gedung kantor tersebut untuk Tahun Anggaran 2009, bukan proyek untuk tahun anggaran berkelanjutan atau anggaran berikutnya atau multi year.

**Ad. c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah keuangan Negara menjadi rugi atau berkurang, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah yang pada intinya suatu



kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tujuan kemakmuran;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah dibangunnya 3 kantor yakni kantor Pertanian dan Peternakan, BAPPEDA dan BPPKAD, yang semula kantor Pertanian dan Peternakan seluas 500 m<sup>2</sup> dengan pagu anggaran Rp 940.599.000,- kantor BAPPEDA seluas 300 m<sup>2</sup> dengan pagu anggaran Rp 847.330.000,- dan kantor BPPKAD seluas 333 m<sup>2</sup> dengan pagu anggaran Rp 940.698.000,- menjadi setiap kantor luasnya 120 m<sup>2</sup> dari bahan kayu dengan nilai bangunan Rp 2.100.000,- per m<sup>2</sup> nya, maka telah terjadi kerugian negara dari selisih pagu anggaran proyek awal dikurangi dengan nilai bangunan yang sudah jadi ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa adanya pembangunan 7 kantor di lingkungan SKPD kab. Batubara tersebut, Pemerintah Kab. Batubara tidak dirugikan , bahkan Pemerintah Kab. Batubara telah diuntungkan dengan adanya 7 kantor SKPD di Kab. Batubara yang baru dimekarkan menjadi Kabupaten dan bangunan yang ada tersebut sangat-sangat membuat bangga masyarakat setempat khususnya, yang kembali menghidupkan sejarah adat Melayu Batubara dan dengan adanya pembangunan 7 Kantor SKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Batubara sejak saat itu tidak perlu lagi menyewa kantor dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima, karena pelaksanaan proyek pembangunan gedung negara atau milik negara termasuk Pemerintah Daerah, harus didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang hal itu yaitu antara lain Keppres nomor 80 tahun 2003 ;

Menimbang , bahwa alasan Pemerintah Kabupaten Batubara tidak lagi menyewa kantor dari masarakat dan masarakat akan merasa bangga dengan adanya gedung yang dibangun dengan khas adat Melayu Batubara, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan dari Keppres tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis akan mempertimbangkan, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hari Sukardi, ST yang disaksikan oleh terdakwa di dalam melakukan CCO, terhadap 7 proyek pembangunan gedung di lingkungan SKPD Kab. Batubara, yang diantaranya 3 Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak nya ditanda tangani oleh Hari Sukardi, ST yang disaksikan oleh terdakwa dan Syarial Lafau, ST;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur delik dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum seperti yang diuraikan di dalam point 2 memori bandingnya yakni hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menghukum terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pagu anggaran awal dari 7 pembangunan kantor di lingkungan SKPD Kab. Batubara sebanyak Rp. 6.709.999.900,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Rupiah), yang setiap kantor luasnya hanya 120 m-2 yang berarti lebih sempit dari luas setipa kantor sesuai kontrak semula, akan tetapi besaran pagu anggarannya tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan harta benda atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sudah benar, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang mempertimbangkan bahwa oleh karenan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa besar harta yang diperoleh dari perbuatan terdakwa, maka tuntutan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti harus ditolak;





Menimbang, bahwa seperti tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2012/ PN MDN tanggal 19 Oktober 2012 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti seperti yang diajukan di persidangan maka dipertimbangkan sebagai tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.19/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa Ir. IRWANSYAH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir.IRWANSYAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama "
4. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun





dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000, pelaksana CV. RAZASA AGUNG.

1. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 705.815.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.599.000, pelaksana UD. RAZASA KARYA.
3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 847.330.000, pelaksana CV. TEGAR PRIMA.



4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.1.179.607.000, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG.
5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.777.040.000, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp.963.083.000, pelaksana UD. FINIKA.
7. 1 (satu) buku foto copy Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.
  - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA.
  - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.
  - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA.



- e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA
- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA.
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG.
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum



Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.

l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA.

m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG.

n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara ke Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG

8. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal Dua Bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (375M2)

10.2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor: 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.

11.1 (satu) set Asli Final Quantity pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batu Bara (375M2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 705.815.000,00 (tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

12.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 940.599.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 13.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama nomor: 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 14.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 15.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor:162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), Nilai Kontrak: sebesar Rp. 940.698.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 16.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor:162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 17.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 18.1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333M2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG.
- 19.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 20.7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- 21.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009.
- 22.2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009.
- 23.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (300M2) dengan Nomor Kontrak: 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp. 847.330.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 24.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan nilai kontrak: : Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 27.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (417M2) dengan Nomor Kontrak: 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak: Rp. 1.179.607.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 28.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan nomor: 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor:161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 30.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 31.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (270M2) dengan Nomor kontrak: 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nilai kontrak sebesar Rp. 777.040.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 32.2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (sembial Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).



- 33.2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor: 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- 34.2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009.
- 35.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten batubara Kecamatan Lima Puluh (33M2) dengan Nomor Kontrak: 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp. 963.083.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 36.1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR GUNUNG.
- 37.1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kab. Batubara (333m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kec. Lima Puluh, nilai kontrak Rp. 940.698.000 UD. RAZASA AGUNG.
- 38.1 (satu) set buku asli LOPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.
- 39.1 (satu) buku Asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.
- 40.1 (satu) set asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp.963.083.00.00, UD.FINIKA
- 41.1 (satu) asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD kabupaten Batu bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-





LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak  
Rp.963.083.000.00, UD.FINIKA

42.1 (satu) buku Asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor  
Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batu Bara (270 M2) Kecamatan Lima  
Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus  
2009 nilai kontrak Rp 777.040.000.00, PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.

43.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor  
Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara (375 m2) Tahap I  
Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal  
07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.705.815.000.00, UD.RAZASA KARYA.

44.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor  
Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Batu Bara (417 M2) Tahap I  
Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak : 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009  
tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.1.179.607.000.00, PT.PAGAR  
GUNUNG.

45.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor  
Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) kecamatan  
Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus  
2009 Nilai Kontrak Rp. 940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.

46.1 (satu) buku asli LAPORAN BULANAN Pekerjaan Pembangunan Kantor  
Bapeda Kabupaten Batu Bara (300 M2) kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak  
847.330.000.00, CV.TEGAR PRIMA.

47.1 (satu) buku asli LAPORAN BULALAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD  
Kabupaten Batu Bara (333 M2) kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 –  
LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak  
940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.

48.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD  
Kabupaten Batu Bara kecamatan Lima Puluh (33 M2) nomor kontrak 18 –  
LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak  
Rp.940.698.000.00,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus  
Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

49.1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas  
Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara Kecamatan Lima Puluh



(500 M2) Nomor Kontrak 23 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

50.1 (satu ) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batu Bara (300 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.847.330.000.00, CV TEGAR PRIMA.

51.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batu Bara (333 M2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP /SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.698.000.00, CV.RAZASA AGUNG.

52.1 (satu) set asli buku LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batu Bara (500 M2) Kecamatan lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP / SPK/ PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp.940.599.000.00, UD.RAZASA KARYA.

53.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Dinas PU dan Pertambangan Kab. Batu Bara sebesar Rp.1.050.922.600.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.PAGAR GUNUNG.

54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Batu Bara sebesar Rp.754.894.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA.

55.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kab. Batu Bara kecamatan Lima Puluh (270 M2) sebesar Rp.692.272.000.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT.ZHAFIRA TETAP JAYA.

56.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batu Bara Kecamatan Lima Puluh (333 M2) sebesar Rp.838.076.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV.RAZASA AGUNG.

57.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batu Bara



sebesar Rp.628.817.000.00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD.RAZASA KARYA.

- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang di legalisir Pembayaran 100 % Pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara sebesar Rp.858.019.400.00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD.FINIKA.
- 59.Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kab. Batubara No. 114.B/DPU/2009 tentang Penghunjukan Pekabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009.
- 60.Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST.
- 61.Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor : 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST.
- 62.Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009.
- 63.Foto Copy dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009.
- 64.Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22.
- 65.Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kab. Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor paket LP-18.
- 66.Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor paket LP-19.



67. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara (417 m<sup>2</sup>) tahap 1 Nomor paket LP-20.
68. Foto Copy dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m<sup>2</sup>) tahap 1 Nomor paket LP-24.
69. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batubara (333 m<sup>2</sup>) tahap 1 Nomor paket LP-25.
70. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batubara (270 m<sup>2</sup>) tahap 1 Nomor paket LP-24.
71. Foto Copy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batubara (500 m<sup>2</sup>) tahap 1 Nomor paket LP-23.
72. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan bercirikhlas melayu Kab. Batubara.
73. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan Bercirikhlas Melayu Kab. Batubara.
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan bercirikhlas melayu Kab. Batubara.
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan bercirikhlas melayu Kab. Batubara.



76. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian Penawaran Harga Rumah Kayu Tumohon.
77. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
78. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
79. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
80. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
81. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan Harga Bangunan Kayu Tumohon.
82. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara Nomor : 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
83. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
84. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor : 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara.
86. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Bercirikhas Melayu Batubara;
87. Asli Surat dari PPK kepada Kadis PU Nomor : 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.

88. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor : 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD Ta. 2009.

89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor : 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009.

90. Asli Surat Pemberitahuan/Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa

91. Asli Risalah rapat koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009.

92. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009.

93. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batu Bara bulan Periode Desember 2009.

94. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD.

95. Foto Copy dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda.

96. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kab. Batubara.

Digunakan pada perkara lain.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada





hari **SENIN** tanggal **28 JANUARI 2013**, oleh Kami : **MARUAP D. PASARIBU, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **03 DESEMBER 2012 Nomor : 204/ Pen.Pid.Sus.K/2012/PT-MDN**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 JANUARI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **ZAINAL POHAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

ttd

**MARUAP D. PASARIBU, SH.M.Hum.**

ttd

**Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ZAINAL POHAN, SH.**

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

**PANITERA**



**Pengadilan Tinggi Medan**

**TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)